BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil

Dari hasil observasi, wawancara, dan studi dokumentasi yang dilakukan terhadap proses administrasi pertanggungjawaban kegiatan operasional di lingkungan Kantor Polisi Militer TNI AD, diperoleh temuan sebagai berikut:

1. Dokumentasi kegiatan operasional belum seragam

a. Format laporan kegiatan berbeda antar bagian/satuan.

b. Kurangnya penggunaan format resmi dari TNI AD menyebabkan ketidaktertiban dalam dokumentasi kegiatan.

2. Banyak laporan pertanggungjawaban yang terlambat

a. Penyampaian laporan kepada atasan melebihi batas waktu yang ditentukan.

b. Keterlambatan ini disebabkan oleh kurangnya sumber daya manusia yang menguasai prosedur pelaporan.

3. Pertanggungjawaban keuangan tidak sepenuhnya didukung oleh bukti fisik yang sah

a. Beberapa item pengeluaran tidak disertai bukti transaksi yang lengkap (kwitansi, faktur, atau nota dinas).

Dipindai dengan CamScanner

b. Penggunaan anggaran tidak sepenuhnya sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam RKA-KL.

4. Belum maksimalnya pemanfaatan teknologi informasi

a. Pelaporan masih dilakukan secara manual.

b. Belum ada sistem informasi yang mendukung pengumpulan dan pelacakan laporan kegiatan secara digital.

5. Kurangnya pelatihan dan pembinaan administrasi

a. Personel pelaksana operasional sebagian besar belum mendapat pelatihan terkait tata kelola administrasi dan keuangan.

b. Tidak semua staf memahami peraturan terkait pertanggungjawaban keuangan negara (misalnya PMK, SAKTI, dan aturan internal TNI).

4.2 Pembahasan

Hasil temuan di atas menunjukkan adanya kesenjangan antara pelaksanaan kegiatan operasional dan administrasi pertanggungjawaban yang ideal menurut ketentuan hukum dan peraturan internal TNI AD.

1. Ketidaktertiban Administrasi

Ketidakteraturan dalam format dan isi laporan menunjukkan bahwa belum diterapkan SOP yang seragam dan mengikat. Padahal, sebagai instansi militer, keteraturan administratif sangat penting untuk mendukung prinsip disiplin dan akuntabilitas.

Dipindai dengan CamScanner

2. Kelemahan dalam Pengelolaan Anggaran

Bukti pengeluaran yang tidak lengkap atau tidak sah berisiko menimbulkan temuan dari lembaga pengawas seperti Itjen TNI atau BPK. Hal ini mencerminkan perlunya peningkatan pemahaman personel terhadap regulasi keuangan negara dan tata cara penyusunan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang sesuai aturan.

3. Kurangnya Dukungan Teknologi

Ketiadaan sistem digital menyebabkan proses pelaporan menjadi lambat, rentan hilang, dan menyulitkan dalam pengarsipan. Implementasi sistem pelaporan elektronik sangat dibutuhkan untuk efisiensi dan pengawasan.

4. Faktor Sumber Daya Manusia

Personel pelaksana, terutama yang bertugas di bagian operasional, umumnya lebih fokus pada aspek lapangan dan tidak memiliki kompetensi administratif yang memadai. Hal ini menandakan perlunya program pelatihan dan pembinaan rutin mengenai administrasi, keuangan, dan pelaporan.

Dipindai dengan CamScanner